

Manajemen Barang Milik daerah dan Optimalisasi Pengelolaan Aset Provinsi X

Periansya¹

Farah Azmi²

Yuliana Sari³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Sriwijaya

*Correspondences : periansya@polsri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui hubungan antara manajemen barang milik daerah terhadap optimalisasi pengelolaan aset serta perencanaan, identifikasi bmd, inventaris bmd dan pengawasan serta pengendalian sebagai variabel. Data dikumpulkan dari pegawai badan pengelola keuangan dan aset daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui kuisisioner terstruktur. Sampel yang digunakan sebanyak 56 pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dianalisis menggunakan SPSS versi 25. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel Perencanaan dan Pengawasan dan Pengendalian berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset, sedangkan variabel Identifikasi BMD berpengaruh negatif. *Inventory* BMD tidak berpengaruh terhadap optimalisasi manajemen aset.

Kata Kunci: Perencanaan; Identifikasi; Inventaris; Pengawasan dan pengendalian; Optimalisasi Pengelolaan Aset

Regional Property Management and Optimization of Provincial Asset Management X

ABSTRACT

This study aims to determine the relationship between regional property management to the optimization of Asset management as well as planning, identification of BMD, BMD inventory and supervision and control as a variable. Data were collected from employees of the regional financial and Asset management agency of South Sumatra Province through a structured questionnaire. The sample used was 56 employees at the Regional Financial and Asset Management Agency of South Sumatra Province and analyzed using SPSS version 25. The results showed that the Planning and Supervision and Control variables had a significant positive effect on the optimization of Asset management, while the BMD Identification variable had a negative effect. Inventory BMD does not affect the optimization of Asset management.

Keywords: Planning; Identification; Inventory; Supervision and Control; Optimization of Asset Management

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 10
Denpasar, 26 Oktober 2022
Hal. 3081-3097

DOI:
10.24843/EJA.2022.v32.i10.p13

PENGUTIPAN:
Periansya, Azmi, F. & Sari, Y. (2022). Manajemen Barang Milik Daerah terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Provinsi Sumatera Selatan. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(10), 3081-3097

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
29 Juli 2022
Artikel Diterima:
20 September 2022

PENDAHULUAN

Kinerja perekonomian daerah sangat bergantung pada pengelolaan aset daerah. Pemerintah daerah dapat mendanai pembangunan daerah dengan menggunakan praktik pengelolaan aset yang baik. Masyarakat akan lebih percaya terhadap pengelolaan dana publik jika aset publik ditangani secara profesional dan efektif. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan (Peraturan Pemerintah (PP) No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, 2014) untuk menjamin agar tulisan dinding selalu sesuai dengan fakta dan hal-hal yang nyata. Menurut (Mulyani & Kristiana, 2020) Barang yang dimiliki oleh pemerintah yang berfungsi sebagai operasional untuk pelayanan terhadap masyarakat dengan masa manfaat dan kondisi yang masih bisa di fungsikan Barang (Aset) sering disebut Barang Milik Daerah (BMD) dan Menurut (Yulina *et al.*, 2021a) BMD meliputi aset yang dimiliki pemerintah baik berupa aset tetap maupun aset lancar. (Periansya *et al.*, 2021) menjelaskan Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN / APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan Aset atau BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dengan bersumber dari APBN yang bertujuan untuk dimanfaatkan sebagai sarana atau prasarana kesejahteraan masyarakat. Dan Menurut (Ibrahim & Ridwan, 2020) Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. Optimalisasi aset adalah proses kerja dalam pengelolaan aset yang dimiliki seseorang atau perusahaan. (Hasanuddin, 2017) mengatakan bahwa manajemen aset sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan properti di lingkungan Pemda untuk mencerminkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Permasalahan klasik yang sering dijumpai dalam pengelolaan aset properti adalah status hukum properti yang tidak jelas. (Rahmawati *et al.*, 2020) mengungkapkan bahwasanya jika Barang Milik Daerah mampu dioperasikan secara baik selanjutnya harus dibuat tahap-tahap strategik pada pengelolaan BMD.

Menurut okezone.com, kesulitan pendaftaran aset di Sumsel adalah masih banyak lahan yang belum bersertifikat, lokasi aset tersebar sebagian di sekitar kabupaten/kota Sumsel, dan masih ada tumpang tindih. aset tanah. Kepemilikan daerah merupakan aspek integral dari penyelenggaraan pemerintahan dan pertumbuhan daerah, sehingga harus berhasil dipertahankan secara teratur. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan barang milik negara atau barang milik daerah yang baik harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar tercapai pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab di muka umum atau di muka umum. Penyalahgunaan aset oleh pejabat pemerintah dapat mengakibatkan pembukuan yang tidak benar. Menurut (Belo *et al.*, 2018) permasalahan aset tetap pemerintah daerah pada umumnya terkait adanya barang milik daerah tidak dicatat, barang milik daerah yang tidak ada justru masih dicatat, barang milik daerah dicatat tapi tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah. Hal ini terjadi dikarenakan aset tetap daerah jumlahnya terlalu banyak dalam kuantitas, juga diakibatkan data pencatatan yang sudah belasan atau bahkan puluhan tahun lamanya.

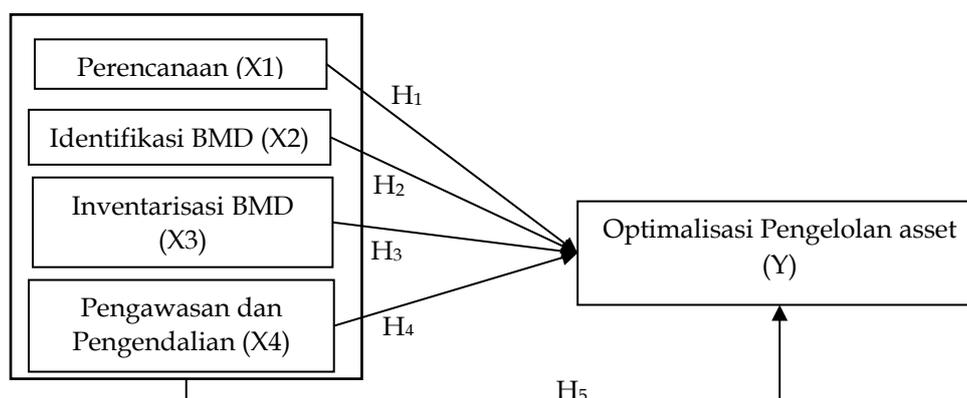
Ketidakakuratan dalam penilaian produk dapat mengakibatkan kesalahan yang cukup besar, karena nilai yang diinvestasikan dalam item sangat tinggi. Administrasi dan pelaporan data yang buruk adalah sumber utama kelemahan real estat regional. Penatausahaan, pengelolaan, inventarisasi, serta pemantauan dan pengendalian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum memadai, menurut LHP BPK tentang Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019, nomor 45.B/LHP/XVIII. PLG/06/2020, tanggal 27 Juni 2020. Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) belum ideal. Terdapat aset tetap tanah, aset tetap bangunan, dan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp. Tidak diketahui lokasi Peralatan dan Mesin Aktiva Tetap senilai Rp9.405.063.791,24. Pemeriksaan terhadap rincian aset tetap mengungkapkan bahwa terdapat 176 aset tetap dengan nilai total Rp2.962.128.456,00 yang memiliki informasi rusak, hilang, lelang tetapi masih tercatat sebagai aset tetap dalam kondisi baik atau buruk. Tabel berikut menyajikan rekapitulasi aset tetap beserta uraiannya yang telah dimusnahkan, hilang, atau dilelang tetapi masih tercatat sebagai aset tetap.

Dalam hal ini, ada faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pengelolaan barang milik daerah. Perencanaan ditetapkan dalam PERMENDAGRI 19/2016 sebagai proses penjabaran kebutuhan barang milik daerah. Perencanaan dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan penggunaan sumber daya lokal secara efisien dan ekonomis. Perubahan dalam organisasi mungkin memerlukan pembelian properti tambahan di wilayah yang berbeda. Perencanaan dapat meramalkan perubahan ini dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukungnya. Menurut (Hasan, 2019) Dengan memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan aset tetap maka perolehan aset dapat dilakukan secara efektif, efisien, serta memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Menurut (Rachmawati *et al.*, 2018) *Asset* atau Barang Milik daerah (BMD) merupakan faktor terpenting yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan maupun pemerintahan untuk kelangsungan operasional perusahaan dan pemerintahan itu sendiri. *Asset* didefinisikan sebagai sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas perusahaan/ organisasi. Menurut (Yasin *et al.*, 2021) Manajemen aset menjadi suatu bidang ilmu dalam dunia pendidikan yang muncul akibat adanya kenyataan di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan juga infrastruktur yang masih belum dikelola dengan baik. Oleh karena itu, segala kekayaan yang dimiliki oleh negara ini mestinya dikelola dan dijaga keberadaannya dan dalam pemanfaatannya jangan berlebihan atau *over capacity*. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasil guna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah¹. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi (Rahmadhani & Ariani, 2022). Menurut (Ricardo *et al.*, 2022) Pengelolaan barang milik daerah tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian,

pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan bukan dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya Oleh karena itu, *Asset* harus dijaga, dilindungi dan dikelola secara profesional agar memiliki usia lebih panjang dan tidak menyebabkan turunnya nilai jual dan semakin baik Manajemennya, semakin efisien penggunaan barang milik daerah.

Penelitian terdahulu dengan menguji Variabel-variabel yang diprediksi berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset seperti Perencanaan, Identifikasi, inventaris, serta pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh (Ferdinanda *et al.*, 2017), (Winarni & Sari, 2020), (Ardiani, 2020) dan (Umbora *et al.*, 2018) . Dimana hasil penelitian Inventaris Aset, Berpengaruh Positif Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset Tetap (Ferdinanda *et al.*, 2017), (Winarni & Sari, 2020) dinyatakan bahwa Perencanaan, Identifikasi Pengawasan dan pengendalian berpengaruh Signifikan terhadap Optimalisasi pengelolaan aset. Sementara hasil penelitian (Umbora *et al.*, 2018) Inventaris tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset. Dan hasil penelitian (Ardiani, 2020) Inventaris secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Dengan demikian terlihat ketidaksinkronan dari hasil penelitian terdahulu, maka dalam hal ini peneliti tertarik menguji Kembali mengenai Pengaruh Manajemen Barang Milik daerah terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada *variable* identifikasi, dimana *variable* ini belum pernah diteliti sebelumnya. Serta tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu Bada pengelola Keuangan dan aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Keterbaruan pada penelitian ini terletak pada periode tahun yang diteliti yaitu 3 tahun terakhir dengan Badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai sampelnya. penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel inventaris bmd dan legal audi yang mempengaruhi optimalisasi bmd (Rizqina & Nadirsyah, 2021) namun dalam penelitian ini menambahkan pengawasan perencanaan, dan identifikasi bmd sebagai keterbaruan penelitian.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber : Data Penelitian, 2022

Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dari fenomena penelitiann yang membutuhkan pembahasan secara empiris komprehensif, dengan hipotesis penelitian Pengaruh Manajemen Barang

Milik Daerah Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Agency Theory Menurut Jensen dan Meckling (Nihayati & Bawono, 2019), dalam teori *agency* terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan yaitu hubungan yang muncul ketika satu pihak (*principal*) memberikan atau mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, yang menjadi *agent* adalah pemerintah, sedangkan *principal* yang dimaksud di sini adalah masyarakat. Sedangkan menurut (Nihayati & Bawono, 2019), *Agency Theory* dapat dilihat melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh *principal* dalam rangka pengelolaan aset daerah. Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh *agent* dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dan *agent*, di satu sisi, *agent* secara moral bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah agensi, sehingga diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian yang terus menerus dari intern organisasi maupun dari pihak eksternal. Pemerintah daerah seharusnya melakukan pengelolaan real estate di bawah penguasaannya secara komersial Sebagaimana dikutip oleh (Puspitarini *et al.*, 2017) Dalam penelitian ini pengawasan dan pengendalian difokuskan pada pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pengelola barang dan pengguna barang di masing-masing OPD. Berdasarkan teori keagenan pengelolaan sumber daya oleh pemerintah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut (Hadiani, 2017) Perencanaan BMD merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Menurut (Mukharofah & Elfan, 2022) Perencanaan sebagai tahapan awal dan penting dalam pengelolaan BMD merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik semakin baik perencanaan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Perencanaan adalah salah satu fase manajemen yang terlibat dalam pelaksanaan strategi organisasi, yang harus mempertimbangkan ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Pemerintah berperan sebagai agen berkaitan dengan perencanaan aset serta besaran anggaran yang akan digunakan dalam pembangunan aset tersebut. Dalam hal ini pemerintah harus mengelola anggaran secara efektif dan efisien guna memaksimalkan pembangunan aset serta penggunaannya dan manfaatnya yang dapat diberikan kepada masyarakat. Menurut (Monica *et al.*, 2017) Proses perencanaan untuk kebutuhan barang dalam BPKAD dilaksanakan sebagai berikut: Kuasa Pengguna mengajukan usul rencana kebutuhan barang (RKBMD) kepada Pengguna untuk disampaikan kepada Pengelola Barang dengan melihat barang-barang apa saja yang dibutuhkan. Usulan tersebut ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) setelah dibahas oleh Pengelola bersama Pengguna dengan memperhatikan hasil inventarisasi barang yang dikuasai pengguna barang. Demikian pula, entitas pemerintah daerah memerlukan

perencanaan yang kompeten dan bertanggung jawab sebagai bagian dari prosedur yang ekonomis, efektif, dan efisien untuk memperoleh aset daerah. Oleh karena itu, perencanaan yang lebih baik akan meningkatkan tingkat optimalisasi pengelolaan properti di kawasan tersebut (Winarni & Sari, 2020). Berdasarkan hal tersebut, hipotesis berikut disajikan untuk penelitian ini.

H₁: perencanaan berpengaruh Positif terhadap optimalisasi pengelolaan aset.

Prosedur identifikasi inventaris juga penting. Identifikasi adalah proses mengklasifikasikan dan mendefinisikan aset daerah dengan benar dan menetapkan kode sehingga tujuan dan penggunaan aset, serta lokasi dan area produknya, dapat ditentukan dengan pasti. Kepala Daerah mengangkat atau menugaskan kembali pengelolaan barang di masing-masing unit. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan dokumentasi barang yang digunakan selama penggunaannya. Pemerintah sebagai agen dalam hal identifikasi agar dapat memastikan data informasi aset sudah akurat atas inventarisasi yang dilakukan. Hal ini berguna untuk optimalisasi aset daerah secara akuntabel. Adanya identifikasi aset yang baik dapat memudahkan pemerintah dan masyarakat memastikan bahwa apakah aset tersebut dapat menjadi potensi aset daerah. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip organisasi dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka fungsi atau wewenang kepengurusan diserahkan kepada perangkat pembantu dengan tidak mengurangi tanggung jawab Kepala Daerah. Dengan demikian, tugas pemberi kuasa (Kepala Daerah), koordinator (satuan kerja yang disetujui dan didelegasikan), dan bendahara adalah mengelola komoditas daerah (Widayanti, 2016). Oleh karena itu, semakin akurat properti daerah diidentifikasi, semakin efisien properti daerah digunakan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis berikut disajikan untuk penelitian ini.

H₂: Identifikasi barang milik daerah berpengaruh negatif terhadap optimalisasi pengelolaan aset.

Menurut (Antoh, 2017), Inventarisasi aset terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah inventarisasi fisik yang meliputi bentuk aset, luasan, lokasi, jumlah volume, dan jenisnya; yang kedua adalah inventarisasi yuridis hukum yang mencakup status penguasaan aset dan legalitas. Menurut (Salamah, 2017) Tujuan pengelolaan inventarisasi adalah menyediakan persediaan peralatan kantor dengan jumlah dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan, Selain melakukan inventarisasi asal saat melakukan inventarisasi aset, penting untuk melakukannya. Menurut (ridwan, 2020) Buku inventaris tersebut memuat data yang meliputi nomor, spesifikasi barang, bahan, asal/ cara perolehan barang, ukuran barang konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang dan harga, keterangan. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, inventarisasi aset milik pemerintah yang sering dan lengkap diperlukan karena jumlah aset tersebut sangat besar. Pemerintah sebagai agen dalam inventarisasi aset berperan dalam melakukan perhitungan sistematis serta pengelompokan aset guna menjaga ketertiban administrasi yang bertujuan menjaga kekayaan serta dapat memberikan informasi akurat terkait aset yang dikelola. Menurut (Suharni *et al.*, 2022) Inventarisasi wajib dilakukan agar tidak terjadi minimnya informasi

pada aset yang digunakan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas pengelolaan aset daerah. Real estate regional akan lebih unggul. Berdasarkan hal tersebut, teori-teori berikut ditawarkan dalam penelitian ini.

H₃: Inventarisasi barang milik daerah tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset.

Pengawasan dan pengendalian adalah komponen kunci dari siklus manajemen BMD, mulai dari perencanaan kebutuhan BMD hingga pelaporan berkala. Di pemerintahan kota saat ini, pengawasan dan kontrol atas penggunaan dan pengalihan aset merupakan tantangan umum. Dari tahap perencanaan hingga pelepasan aset, Menurut (Mokodompit *et al.*, 2017) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. (Dewi *et al.*, 2018) menekankan perlunya pengawasan yang ketat. Sangat penting untuk memverifikasi bahwa semua metode dan prosedur manajemen BMD telah dijalankan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Pemerintah berperan sebagai agen dalam hal pengawasan. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan serta pengelolaan aset telah dilakukan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan apakah ada temuan *controlling* dalam manajemen aset dan hal ini berguna meningkatkan penggunaan aset yang lebih optimal. Serta Pemerintah berperan sebagai agen dalam hal pengendalian. Pemerintah harus dapat memastikan apakah aset sudah dikelola sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dalam hal ini pengendalian dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara keberadaan aset dengan strategi entitas secara efektif dan efisien. Menurut (Hartanto, 2019) Dalam hal pengawasan dan pengendalian, dilaksanakannya kegiatan Rapat koordinasi bagi para Kasubag umum dan pengurus barang seluruh SKPD secara berkala setiap tiga bulan sekali. Dengan terselenggaranya pengawasan dan pengelolaan barang milik daerah yang prima, pemanfaatan barang milik daerah akan lebih optimal. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis berikut disajikan untuk penelitian ini.

H₄: Pengawasan dan pengendalian berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kesbangpol, populasi penelitian ini adalah 91 pegawai pemerintah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sample penelitian ini menggunakan pendekatan sampel Purposive sampling, dengan 56 pegawai dari Bidang Barang Milik Daerah dan Sekretariat dipilih secara acak.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui penggunaan kuesioner. Dalam kuesioner, responden menjawab serangkaian pertanyaan atau menyampaikan komentar tertulis. (Sugiyono, 2019) Ketika peneliti yakin dengan faktor-faktor yang akan dievaluasi dan jawaban yang diharapkan dari responden, kuesioner merupakan pendekatan pengumpulan data yang efisien.

Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data untuk penelitian ini. Untuk memudahkan analisis dan mengevaluasi hipotesis yang diberikan, digunakan SPSS versi 25 untuk menganalisis data yang diperoleh. Setelah dilakukan uji validitas, reliabilitas, dan normalitas, analisis semacam ini dapat digunakan.

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Optimalisasi Pengelolaan Aset
- b₀ = Konstanta
- X₁ = Perencanaan
- X₂ = Identifikasi Barang Milik Daerah
- X₃ = Inventarisasi Barang Milik Daerah
- X₄ = Pengawasan dan Pengendalian
- β = Koefisien Regresi
- e = Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pejabat pemerintah di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Dari 60 survei yang diberikan kepada responden, 54 atau 90 persen mengembalikan kuesioner dan 6 atau 19 persen tidak kembali.

Berdasarkan tabel, nilai R yang dihitung secara keseluruhan lebih besar dari R tabel untuk ukuran sampel (N) sebesar 30 dan tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa data yang diteliti dalam penelitian ini dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai alat penelitian.

Perencanaan, identifikasi barang milik daerah, inventarisasi barang milik daerah, pemantauan dan pengendalian, serta optimalisasi pengelolaan aset antara lain (0,710), sesuai dengan tabel koefisien ketergantungan di atas (0,829). Semua nilai variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien alpha Cronbach lebih besar dari 0,60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap instrumen yang digunakan dalam penelitian ini kredibel.

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh persamaan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut.

$$Y = 22,590 + 0,661 X_1 + 0,552 X_2 - 0,064 X_3 + 0,431 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Optimalisasi "Pengelolaan" Aset
- X₁ = Perencanaan
- X₂ = Identifikasi "BMD
- X₃ = Inventaris BMD
- X₄ = Pengendalian dan Pengawasan Aset
- E = Error

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	No Pernyataan	r hitung	r tabel	Kriteria
Optimalisasi Pengelolaan Aset	1	0,586	0,361	Valid
	2	0,687	0,361	Valid
	3	0,715	0,361	Valid
	4	0,621	0,361	Valid
	5	0,742	0,361	Valid
	6	0,751	0,361	Valid
	7	0,588	0,361	Valid
	8	0,469	0,361	Valid
	9	0,711	0,361	Valid
Perencanaan	1	0,780	0,361	Valid
	2	0,747	0,361	Valid
	3	0,589	0,361	Valid
	4	0,718	0,361	Valid
	5	0,478	0,361	Valid
	6	0,576	0,361	Valid
	7	0,597	0,361	Valid
Identifikasi Barang Milik Daerah	1	0,598	0,361	Valid
	2	0,478	0,361	Valid
	3	0,676	0,361	Valid
	4	0,387	0,361	Valid
	5	0,631	0,361	Valid
Inventaris Barang Milik Daerah	1	0,607	0,361	Valid
	2	0,570	0,361	Valid
	3	0,485	0,361	Valid
	4	0,534	0,361	Valid
	5	0,588	0,361	Valid
Pengawasan Dan Pengendalian	1	0,738	0,361	Valid
	2	0,722	0,361	Valid
	3	0,379	0,361	Valid
	4	0,672	0,361	Valid
	5	0,499	0,361	Valid

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item	Kesimpulan
Perencanaan	0,738	7	Reliabel
Identifikasi Barang milik daerah	0,698	5	Reliabel
Inventaris Barang milik daerah	0,710	5	Reliabel
Pengawasan dan Pengendalian	0,603	5	Reliabel
Optimalisasi pengelolaan Aset	0,829	9	Reliabel

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Linear Berganda

Model		Coefficients ^a		t	Sig.	
		Unstandardized	Standardized			
		Coefficients	Coefficients			
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22,590	6,490		3,481	0,001
	Perencanaan	0,661	0,159	0,510	4,171	0,000
	Identifikasi BMD	-0,552	0,164	-0,405	-3,366	0,001
	Inventaris BMD	-0,064	0,198	-0,039	-0,326	0,746
	Pengawasan Dan Pengendalian	0,431	0,184	0,276	2,347	0,023

a. *Dependent Variable: Optimalisasi Pengelolaan Aset*

Sumber: Data Penelitian, 2022

Persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut pertama Nilai konstanta-(a) pada persamaan ini sama dengan 22.590, yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata adalah konstan (tidak berubah) atau sama dengan 22.590. Nilai konstanta-a dalam persamaan ini adalah 22,590 (yang menurut G telah dimodifikasi) atau 22,590. Koefisien regresi positif untuk variabel Perencanaan (X1) adalah 0,661. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap 1 (satu) peningkatan perencanaan, Optimalisasi Manajemen Aset akan naik sebesar 0,661%, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien regresi (X2) variabel Identifikasi BMD negatif sebesar -0,552. Ini menunjukkan bahwa tingkat Pengoptimalan Manajemen Aset berkurang sebesar -0,552 unit untuk setiap kenaikan unit dalam Identifikasi BMD, asalkan semua variabel independen lainnya tetap konstan. Koefisien regresi untuk variabel BMD *Inventory* (X3) bertanda negatif dengan nilai -0,064. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan unit BMD *Inventory*, tingkat Optimalisasi Manajemen Aset akan turun sebesar -0,064, asalkan semua variabel independen lainnya tetap konstan. Sebesar 0,431, koefisien regresi untuk variabel Pengawasan dan Pengendalian (X4) adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan satu unit dalam Pengawasan dan Pengendalian, tingkat Optimalisasi Manajemen Aset akan meningkat sebesar 0,431%, dengan asumsi semua variabel independen lainnya tetap konstan.

Uji parsial (uji t) masing-masing variabel bebas Perencanaan (X1), Identifikasi BMD (X2), Inventarisasi BMD (X3), dan Pengawasan dan Pengendalian (X4) untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan. Uji parsial dilakukan dengan premis bahwa keluaran regresi SPSS akan memberikan nilai t dan jika signifikan secara statistik.

Uji-t dilakukan untuk mengetahui sejauh mana H, variabel independen, sebagian (secara individual) menjelaskan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan uji dua arah (*Two-Tailed*) untuk mengetahui apakah suatu variabel mempengaruhi variabel terikat secara positif atau negatif. Tingkat signifikan = 0,05, maka ttabel dihitung sebagai $0,05 : 2 = 0,025$ dengan menggunakan rumus (df) $n-k-1$ atau (df) $54-4-1 = 49$, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel. Berdasarkan hasil tersebut, nilai t-tabel S adalah 2,00958. Hasil uji-t ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji -t (Parsial)

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	22,590	6,490		3,481	0,001
	Perencanaan	0,661	0,159	0,510	4,171	0,000
	Identifikasi BMD	-0,552	0,164	-0,405	-3,366	0,001
	Inventaris BMD	-0,064	0,198	-0,039	-0,326	0,746
	Pengawasan Dan Pengendalian	0,431	0,184	,0276	2,347	0,023

a. *Dependent Variable: Optimalisasi Pengelolaan Aset*

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil hipotesis pertama Perencanaan diyakini memiliki pengaruh terhadap Optimalisasi Manajemen di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil analisis S yang dilakukan dengan melakukan uji t (parsial) terhadap pengaruh perencanaan terhadap optimalisasi pengelolaan aset, diperoleh hasil yang signifikan pada $R_{0,000} 0,05$ dengan nilai $t 3,481 > t_{tabel} 2,010$, menunjukkan bahwa perencanaan berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Temuan uji parsial pada hipotesis pertama dengan demikian menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan memiliki dampak menguntungkan yang cukup besar pada optimalisasi pengelolaan aset.

Hasil Hipotesis kedua, Identifikasi BMD diduga berpengaruh secara parsial terhadap Optimalisasi Pengelolaan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan dengan melakukan uji-t (parsial) atas pengaruh Identifikasi BMD terhadap optimalisasi pengelolaan aset diperoleh hasil signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ dengan nilai t-hitung sebesar $-3,366 > t_{tabel} 2,010$. Maka dapat disimpulkan hasil dari pengujian parsial pada hipotesis kedua adalah H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini berarti Identifikasi BMD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Optimalisasi pengelolaan aset.

Hasil hipotesis ketiga, Inventaris BMD diduga berpengaruh secara parsial terhadap Optimalisasi Pengelolaan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan dengan melakukan uji-t (parsial) atas pengaruh Inventaris BMD terhadap optimalisasi pengelolaan aset diperoleh hasil signifikan sebesar $0,746 > 0,05$ dengan nilai t-hitung sebesar $-0,326 < t_{tabel} 2,010$. Maka dapat disimpulkan hasil dari pengujian parsial pada hipotesis ketiga adalah H_a ditolak dan H_0 diterima. Hal ini berarti Inventaris BMD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Optimalisasi pengelolaan aset.

Hasil hipotesis keempat, Pengawasan dan pengendalian diduga berpengaruh secara parsial terhadap Optimalisasi Pengelolaan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan dengan melakukan uji-t (parsial) atas pengaruh Pengawasan dan pengendalian terhadap optimalisasi pengelolaan aset diperoleh hasil signifikan sebesar $0,023 < 0,05$ dengan nilai t-hitung sebesar $2,347 > t_{tabel} 2,010$. Maka dapat disimpulkan hasil dari pengujian parsial pada hipotesis pertama adalah H_a diterima dan H_0 ditolak.

Hal ini berarti Pengawasan dan pengendalian berpengaruh secara positif signifikan terhadap Optimalisasi pengelolaan aset.

Uji simultan dilakukan untuk melihat apakah pengaruh variabel independen secara simultan terhadap perubahan nilai variabel dependen. Hasil pengujian simultan semua variabel dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Uji-F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	97,425	4	24,356	6,645	0,000 ^b
	Residual	179,612	49	3,666		
	Total	277,037	53			

a. *Dependent Variable:* Optimalisasi Pengelolaan Aset

b. *Predictors: (Constant), Pengawasan Dan Pengendalian, Perencanaan, Inventaris BMD, Identifikasi BMD*

Sumber: Data Penelitian, 2022

Pada penelitian ini uji-F dilakukan pada tingkat kepercayaan $\alpha=5\%$ atau 0,05. Untuk nilai $df(N1) = 5-1 = 4$ dan $df(N2) = 54 - 4 = 50$. Sehingga diperoleh hasil F-tabel sebesar 2,56. Berikut hasil keputusan dari uji-F.

Perolehan hasil nilai F diperoleh F-hitung sebesar 6,645 dengan nilai signifikan 0,000 dapat ditarik kesimpulan hipotesis diterima karena nilai F-hitung $>$ F-tabel yaitu $6,645 > 2,56$ yang berarti seluruh variabel dalam penelitian ini Perencanaan, Identifikasi BMD, Inventarisasi BMD, serta Pengawasan dan Pengendalian secara simultan (bersama-sama) terhadap Optimalisasi pengelolaan aset.

Uji R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas dalam variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R^2 menunjukkan seberapa cocok data dengan model. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin baik model cocok dengan data. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,593 ^a	0,352	0,299	1,915

a. *Predictors: (Constant), Pengawasan Dan Pengendalian, Perencanaan, Inventaris BMD, Identifikasi BMD*

b. *Dependent Variable:* Optimalisasi Pengelolaan Aset

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa R sama dengan 0,593. Nilai koefisien korelasi ini menunjukkan bahwa variabel Perencanaan, Identifikasi BMD, Inventarisasi BMD, dan Pengawasan dan Pengendalian bersifat informatif. Hasil *Adjusted R Square* atau Koefisien Determinasi yang dicapai sebesar 0,299 dapat dilihat pada tabel di atas. Variabel X memberikan kontribusi pengaruh sebesar 38,8 persen terhadap variabel Y, sedangkan persentase sisanya (100 persen - 29,9 persen) sebesar 70,1% dijelaskan oleh variabel di luar model regresi.

Berdasarkan hasil penelitian pengujian hipotesis penelitian ini, variabel Perencanaan (X1) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap

Optimasi Manajemen Aset (Y). Dengan t-hitung sebesar 3,481 dan koefisien regresi sebesar 0,661, analisis menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 0,05 dan p-value sebesar 0,000 0,05. Berdasarkan data yang terkumpul, dapat ditentukan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa indikator perencanaan yaitu penganggaran, kondisi interval komoditas, dan permintaan barang milik daerah berdampak pada optimalisasi pengelolaan aset. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aturan dan standar properti daerah diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan perencanaan properti daerah yang sangat baik.

Berdasarkan temuan penelitian ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah efektif melaksanakannya. Sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016, perencanaan permintaan diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut perumusan kebutuhan barang milik daerah dalam rangka menghubungkan pengadaan barang masa lalu dengan kondisi saat ini guna pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Setiap tahun, setelah pembuatan rencana kerja (Renja) OPD, kebutuhan properti daerah direncanakan. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian (Sari, 2020) sebelumnya, yang menyimpulkan bahwa perencanaan memiliki dampak yang baik terhadap optimalisasi manajemen aset.

Berdasarkan hasil investigasi, variabel Identifikasi Barang Milik Daerah (X2) tampaknya berpengaruh negatif dan substansial terhadap optimalisasi pengelolaan aset (Y). Dengan nilai t-hitung sebesar -3,366 dan koefisien regresi sebesar -0,552, analisis menghasilkan nilai signifikansi 0,001 0,05 dan p-value 0,05. Berdasarkan data tersebut, dapat ditentukan bahwa H_{02} tidak dapat diterima dan H_{a3} OK. Hal ini menunjukkan bahwa indikator identifikasi barang milik daerah berupa pengamanan, pengendalian, dan tindakan hukum berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa aturan dan standarisasi barang milik daerah merupakan salah satu prasyarat keberhasilan identifikasi barang milik daerah.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa BPKAD berfungsi dengan baik. Permendagri ini menyatakan, sesuai dengan Permendagri 19/2016, bahwa identifikasi barang milik daerah merupakan proses klasifikasi dan identifikasi. Penggunaan dan lokasi dapat ditentukan untuk bagian properti tertentu.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Winarni & Sari, 2020), yang menyimpulkan bahwa pengawasan dan pengendalian berdampak buruk pada optimalisasi pengelolaan aset.

Variabel inventarisasi barang milik daerah (X3) tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset (Y) dan tidak signifikan secara statistik, sesuai dengan temuan penelitian pengujian hipotesis penelitian ini. Dengan t-hitung sebesar -326 dan koefisien regresi sebesar -0,064, analisis tersebut menghasilkan hasil yang signifikan sebesar 0,746 0,05 dan p-value 0,05.

Hal ini sesuai dengan pengertian inventarisasi sebagai perhitungan, pengelolaan, pengorganisasian, pengaturan, pencatatan, dan pelaporan BMD dalam satuan penggunaan. Buku inventaris yang terstruktur dengan baik akan melindungi data seperti lokasi, jenis atau merek, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal produk, kondisi barang, dll dari perampasan atau klaim oleh pihak ketiga. Situasi Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sumsel tidak ideal. Ada aset tetap tanah, aset tetap bangunan, dan aset tetap jalan, irigasi,

dan jaringan dengan total nilai Rp. Yang tidak diketahui adalah mesin dan peralatannya.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh (Yulina *et al.*, 2021b), yang menyimpulkan bahwa inventarisasi properti daerah berdampak kecil pada optimalisasi pengelolaan aset.

Berdasarkan hasil penelitian pengujian hipotesis penelitian ini, variabel Pengawasan dan Pengendalian (X4) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap *Optimizing Asset Management* (Y). Penelitian ini menghasilkan nilai signifikansi 0,023 0,05, t-hitung 2,348, dan koefisien regresi 0,431. Berdasarkan data yang terkumpul, dapat ditentukan bahwa H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pengawasan dan pengendalian meliputi pemberian nasehat teknis pengelolaan barang milik daerah, pemberian pelatihan tentang sistem pengelolaan aset daerah, dan pengawasan untuk memastikan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Mempengaruhi optimalisasi manajemen aset. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pedoman dan keseragaman barang milik daerah harus menjadi salah satu syarat untuk mencapai pengawasan dan pengendalian yang prima.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa BPKAD berfungsi dengan baik. Menurut Permendagri 19/2016, Permendagri ini menunjukkan bahwa perencanaan klaim adalah kegiatan untuk menetapkan persyaratan barang milik daerah yang komprehensif untuk menghubungkan pembelian aset sebelumnya dengan keadaan sekarang sebagai landasan untuk masa depan. tindakan. Setelah menetapkan rencana operasi OPD, dilakukan perencanaan tahunan untuk kebutuhan real estat daerah (Renja).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Demetouw *et al.*, 2018) yang menyimpulkan bahwa pengawasan dan pengendalian memiliki dampak yang baik terhadap optimalisasi pengelolaan aset.

Hasil Berdasarkan analisis pengujian hipotesis penelitian ini, optimalisasi variabel perencanaan, identifikasi barang milik daerah, inventarisasi barang milik daerah, pengawasan dan pengendalian pengelolaan aset (Y). Penelitian ini menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 0,05 dengan nilai f-hitung sebesar 6,645 dan nilai f-table sebesar 2,56. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa H_{04} ditolak dan H_{a4} disetujui. Berdasarkan hasil penelitian ini, perencanaan, identifikasi barang milik daerah, inventarisasi barang milik daerah, pemantauan, dan pengendalian dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan aset pemerintah di BPKAD.

SIMPULAN

Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa kesimpulan dari penelitian ini adalah Perencanaan memiliki dampak yang menguntungkan dan substansial bagi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, Optimalisasi Pengelolaan Aset. Identifikasi barang milik daerah berdampak negatif dan substansial terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset BPKAD Provinsi Sumsel. Inventarisasi barang milik daerah tidak berpengaruh pada Optimalisasi Pengelolaan Aset BPKAD di Provinsi Sumatera Selatan. 4) Pengendalian dan Pengawasan Aset berdampak baik dan substansial terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset BPKAD di Provinsi Sumatera

Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah semakin optimal semakin baik pengelolaannya.

Hasil uji coba ini Dimaksudkan agar Bidang BMD di BPKAD Prov Sumsel terus meningkatkan pengajaran dan pelatihan guna memperkuat kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya. Bidang BMD di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembinaan dan pelatihan untuk menambah pengetahuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk meningkatkan akurasi kualitas hasil penelitian dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi, disarankan agar dilakukan penelitian tambahan dengan menggunakan variabel independen seperti, Pemanfaatan, pemindahtanganan, dan Penghapusan yang diyakini berpengaruh terhadap Manajemen BMD, serta memperpanjang jangka waktu dan objek penelitian.

REFERENSI

- Antoh, A. E. (2017). Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap Tanah (Studi di Kabupaten Paniai). *Manajemen & Bisnis*, 1, 37–47.
- Ardiani, S. (2020). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4, 20–31.
- Belo, B. R., Asnawi, M., & Wijaya, A. H. C. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Opd Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(2), 1–33. https://doi.org/10.52062/jurnal_aaa.v1i2.7
- Demetouw, M., Salle, A., & Asnawi, M. (2018). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jayapura. 2(2), 1–15.
- Desi Kartika Sari. (2020). *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Bpkad Provinsi Sumatera Selatan)*. 3(2017), 54–67.
- Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., & Prayudi, M. A. (2018). Optimalisasi Pemanfaatan Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 129–147. <https://doi.org/10.23887/jia.v2i2.15634>
- Ferdinanda, P., Ratang, W., & Kambu, A. (2017). Factor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 83–108.
- Hadiani, C. D. (2015). ... *Barang Milik Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ...* 159–169.
- Hartanto, N. (2019). Implementasi Pp. No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa. *Journal of Management Review*, 2(3), 223. <https://doi.org/10.25157/jmr.v2i3.1799>
- Hasan, W. A. (2019). Sistem Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah

- Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.35326/jiam.v2i1.252>
- Hasanuddin. (2017). Pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap dinas pertanian dan peternakan propinsi sulawesi barat. *Repository.Ut.Ac.Id/7485/1/42825*.
- Ibrahim, F., & Ridwan, R. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 571–577. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16813>
- Mokodompit, D., Morasa, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 43–52. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15308>
- Monica, S. G., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 304–316. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17683.2017>
- Mukharofah, & Elfan, K. (2022). *Peran Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Menilai Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo*. 2, 32–52.
- Mulyani, I. D., & Kristiana, A. (2020). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. *Jurnal MONEX*, 9(1), 38–44.
- Nihayati, A., & Bawono, A. (2019). Analisis Penerapan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada Desa Medayu. *The 9th University Research Colloquium (Urecol)*.
- Peraturan Pemerintah (PP) no 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, (2014).
- Periansya, Frimaruwah, E., Firmansyah, Regita, Sari, I., Septiawati, , Ayu, & Islamiati, D. (2021). Pengaruh Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kota Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 63.
- Puspitarini, I., Firmansyah, A., & Handayani, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Pengelolaan Barang Milik Negara. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 141–149. <https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.501>
- Rachmawati, R., Arwati, D., Dewi Herawati, S., & Gusnandar Arnan, S. (2018). Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penatausahaan Asset / Barang Milik Daerah. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(2), 189–197.
- Rahmadhani, F., & Ariani, R. (2022). Kualitas Aparatur, SIMDA - BMD, Regulasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan BMD. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 291–301. <https://doi.org/10.47233/jeps.v2i1.100>
- Rahmawati, A., Dewi, K., Nugraheni, A. P., & Tidar, U. (2020). The management of Asset s / regional owned goods in labor department of Magelang city. *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(3), 761–776.
- Ricardo, R., Astika, F., & Jepisah, D. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(1), 74–81. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3325>

- Ridwan, M. (2020). *Pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi Pemanfaatan aset tetap pada badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Tanah Bumbu.*
- Rizqina, T. I., & Nadirsyah. (2021). Pengaruh Inventarisasi dan Legal Audit terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dengan Kualitas Aparatur Sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(1), 1.
- Salamah, U. (2017). *Pemanfaatan Sabda Dalam Inventarisasi Aset Daerah Guna Mendukung Penerapan E-Government Di Badan Pengelolaan Mendukung Penerapan E-Government Di Badan Pengelolaan Ummu Salamah dan Durinda Puspasari Universitas Negeri Surabaya mana pemerintahan tersebut ma.*
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabeta.
- Suharni, A., Ardiani, S., & Armaini, R. (2022). *Pengaruh Manajemen Aset Tetap Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Provinsi Sumatera Selatan.* 939-947.
- Umbora, E., Falah, S., & Pangayow, B. J. C. (2018). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(2), 90-112. https://doi.org/10.52062/jurnal_aaa.v1i2.10
- Widayanti, A. M. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Aset Desa (Studi Pada Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang).* (Doctoral Dissertation, STIE PGRI DEWANTARA).
- Winarni, E., & Sari, Y. (2020). Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang (Barang Milik Negara) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 147. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.860>
- Yasin, Y., Putra, F., & Danar, O. R. (2021). Manajemen barang milik daerah berbasis kemitraan dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 147-155. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i2.4914>
- Yulina, B., Dewata, E., Oktarida, A., Mandiangan, P., & Chotibah, A. (2021a). *Pengaruh Inventarisasi Aset , Legal Audit Dan Struktur Birokrasi Terhadap Optimalisasi Barang Milik Daerah (Studi Pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan) 1Program Studi Akuntansi Sektor Publik , Politeknik Negeri Sriwijaya Email : byulina@gmail.com 2 Pr.* 193-200.
- Yulina, B., Dewata, E., Oktarida, A., Mandiangan, P., & Chotibah, A. (2021b). Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Dan Struktur Birokrasi Terhadap Optimalisasi Barang Milik Daerah (Studi Pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan). *ISAS Publishing*, 2579-5031(2302-741X), 1-8.